

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT BERBASIS APLIKASI PELAYANAN TUNGGAL SEPENUH HATI (PETUNG DADI) PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Siti Zubaidah Nurrouhiyyah¹, Desinta Fahma Diana², Oktaviana Eka Ayu Pratama³, Anang Sugeng Cahyono⁴, Slamet Hariyanto⁵

Universitas Tulungagung^{1,2,3,4,5}

¹sitibida18@gmail.com, ²dfahmadiana@gmail.com, ³ekafiana186@gmail.com,

⁴akusukambahdi@gmail.com, ⁵slamethariyanto@gmail.com

Received: 21-12-2024

Revised: 22-02-2025

Approved: 10-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan e-government berbasis aplikasi Pelayanan Tunggal Sepenuh Hati (Petung Dadi) oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan menggunakan model lima pilar Fietkiewicz, Mainka, dan Stock (2017), yang mencakup informasi, komunikasi, transaksi, integrasi, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Petung Dadi memiliki potensi dalam menyederhanakan pelayanan publik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada pilar informasi, masih terdapat kekurangan dalam deskripsi layanan serta keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi. Pilar komunikasi belum optimal karena belum adanya fitur komunikasi langsung dalam aplikasi. Pilar transaksi tidak terpenuhi, karena aplikasi hanya digunakan untuk penerbitan dokumen tanpa transaksi digital. Pilar integrasi mengalami kendala akibat terputusnya akses ke data kependudukan Dukcapil. Simpulan, meskipun aplikasi Petung Dadi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, diperlukan pengembangan lebih lanjut terutama dalam aspek integrasi sistem, peningkatan SDM, serta penguatan komunikasi dan partisipasi publik guna mencapai implementasi e-government yang optimal.

Kata Kunci: E-Government, Aplikasi Petung Dadi, Pelayanan Publik, Lima Pilar Fietkiewicz

PENDAHULUAN

Teknologi sering dimanfaatkan untuk mengakses kebutuhan administrasi yang di butuhkan masyarakat, salah satunya di dalam surat menyurat. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih merasakan kerumitan, serta masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengajuan permohonan surat menyurat. Hal tersebut menjadi keluhan masyarakat dalam pelayanan publik, dikarenakan belum tersedianya teknologi yang memadai, sehingga mengakibatkan penumpukan surat yang ada di kantor desa (Hendriyaldi, Erida, 2022). Permasalahan tersebut menjadi isu yang masih banyak di perbincangkan serta adanya tuntutan dari masyarakat agar pemerintah memperbaiki, meningkatkan serta memberikan pelayanan administratif. Wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang padat, dapat menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang merata dan efektif (Renaldi & Oktariyanda, 2018). Selain itu sepanjang pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dan menghambat proses pelayanan publik, sehingga memaksa penyelenggaraan layanan publik beralih ke metode online atau non-tatap muka (Lestari et al., 2022). Namun dalam kenyataannya banyak terjadi penundaan surat menyurat seperti SKTM dan sebagainya, hal tersebut dikarenakan kepala desa sibuk dilapangan untuk mengatasi covid-19 seperti apa yang telah di sampaikan bupati kabupaten trenggalek (Abidin, 2022). Maka dari itu di dalam masa Covid-19 yang tidak memungkinkan dalam kepengurusan surat secara langsung,

menjadi pertimbangan guna menjawab adanya keluhan dari masyarakat. Fenomena Covid-19 sangat membutuhkan peran pemerintah di dalam penanganan kasus ini, karena banyak membutuhkan beragam solusi yang melibatkan berbagai bidang sesuai dengan apa yang direncanakan dengan matang, sampai pada mengantisipasi konsekuensi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 (Anang Sugeng Cahyono, 2021)

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah memiliki peran yang penting di dalam menyediakan sebuah pelayanan, yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mana didalam pasal 1 menyebutkan, pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai pada Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa serta pelayanan administratif yang telah disediakan penyelenggara pelayanan publik (Hidayat et al., 2024). Pelayanan administrasi yang dibentuk pemerintah Trenggalek yaitu layanan berbasis elektronik dengan tujuan untuk menciptakan *Kota Cerdas* di Trenggalek, sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018 yang menyebutkan sebuah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada ketentuan pasal 18 Perbup Kabupaten Trenggalek No. 24 Tahun 2017 yang didalamnya terdapat peraturan guna mencapai serta melaksanakan implementasi *E-goverment* dan *kota cerdas* di Trenggalek (Renaldi & Oktariyanda, 2018). *E-goverment* didefinisikan sebagai teknologi informasi serta komunikasi strategi sebagai mana kekuasaan dijalankan untuk pengelolaan sumber daya didalam ekonomi dan sosial disuatu Negara. Teknologi informasi memastikan bagaiman efisiensi, kecepatan, jangkauan dan transparansi dapat menggantikan informasi (Cahyono et al., 2024). Sesuai dengan amanat Inpres No. 6 Tahun 2001 dan No. 3 Tahun 2003, yang mana menyebutkan bahwa pengembangan E-Government di Indonesia diarahkan guna menciptakan Pemerintahan yang berbasis elektronik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan publik, serta mewujudkan prinsip-prinsip *Good governance* (Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, 2022).

Maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui dinas komunikasi dan infomatika terus berinovasi dalam merancang pelayanan publik yang inovatif khususnya di bidang administratif, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Hal tersebut, membuat masyarakat tidak harus pergi ke kantor desa demi mengajukan permohonan surat yang dibutuhkan (Setiajit et al., 2023). Diskominfo kabupaten Trenggalek merancang sistem aplikasi yang dapat menghubungkan unit layanan desa dengan layanan kecamatan, demi memudahkan serta mempercepat pelayanan administrasi pengurusan surat-menyerurat. Aplikasi layanan yang dirancang ini disebut dengan *Petung Dadi* yang mana kepanjangan dari (Pelayanan Tunggal Dengan Sepenuh Hati). Aplikasi ini bisa diakses publik di dalam website <https://petungdadi.trenggalekkab.go.id/> . Aplikasi *Layanan Petung Dadi* merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelayanan administrasi di tingkat Desa dan Kecamatan, yang mana pelayanan administrasi dapat dikonfirmasi melalui Front Office Desa. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai jenis layanan, termasuk pengurusan surat-surat penting seperti SKCK, SITU, dan surat keterangan lainnya. Aplikasi *Petung Dadi* yang dibuat oleh Dinas Kominfo Trenggalek bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi, terutama selama pandemi Covid-19. Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam pemberian pelayanan publik karena memungkinkan pelayanan dikerjakan secara online (<https://www.trenggalekkab.go.id>). Maka dari itu masyarakat tidak harus pergi ke kantor secara langsung.

Selain dari pada itu, aplikasi ini juga membantu mengurangi penggunaan kertas di

desa. *Implementasi E-Government* adalah cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabilitas, efektif dan efisien (Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, 2022). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka model pendekatan *pilar E- Government* yang di kemukakan oleh *Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017)* yang terdiri dari lima pilar yakni: information, dissemination, communication, transaction, integration, dan participation. Pilar pertama adalah information yang mana penekanan pilar ini adalah konten yang di tampilkan, serta aspek yang sederhana dan mudah diakses serta dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Pilar kedua adalah communication, yang berfokus dalam komunikasi dua arah pemerintah dan masyarakat, melalui media sosial serta web 2.0. Pilar ketiga, transaction berfokus pada transaksi finansial dan non finansial yang dilakukan melalui sistem pemerintah elektronik. Pilar keempat adalah integration. Sistem E-Government terkadang menghadapi tantangan terbesar karena rumitnya data dan informasi. Untuk mengatasi masalah ini, sistem yang ada harus dapat mengintegrasikan layanan yang mungkin ada di berbagai tingkatan. Pilar terakhir adalah participation, merupakan pengembangan dari E-Government pada bidang politik seperti diskusi publik, pemungutan suara online, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan lainnya (Barker et al., 1986). Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti perlu mengkaji penelitian *E- Government terkait penyelenggaraan layanan Petung Dadi Pemerintah Kabupaten Trenggalek*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan demi mendapatkan data deskriptif yang berasal dari informan berupa informasi tertulis dan aktifitas yang diamati (Haryanti & Indarti, 2022). Sejalan dengan definisi Sugiyono, metode penelitian kualitatif muncul karena pergeseran paradigma tentang realitas, fenomena, atau gejala (Ummah, 2019). Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan, mendeskripsikan, dan memaparkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan situasi dan kondisi lapangan (Muhdiyati & Utami, 2020). Dengan mempertimbangkan hal ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini di gunakan karena keinginan peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan kondisi lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan e-pemerintahan melalui *Aplikasi Petung Dadi*, juga dikenal sebagai Pelayanan Tunggal Sepenuh Hati, oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kominfo Kab. Trenggalek yang berada di Jl KH. Wachid Hasyim No. 5, Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Kode pos 66311. Lokasi ini dituju dikarenakan Dinas Kominfo memberikan layanan khususnya informatika kepada Kabupaten Trenggalek. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti harus menggunakan tiga prinsip: observasi, wawancara, dan dokumen. Observasi dalam Penelitian kualitatif deskriptif alam mengumpulkan data melalui observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan. Pengamatan berbagai peristiwa atau gejala yang berkaitan dengan tujuan penelitian disebut observasi. Wawancara yaitu Pengumpulan informasi melalui pertanyaan yang dirancang oleh peneliti ke narasumber secara langsung digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara (Adolph, 2016). Dokumen: metode analisis dengan mengamati data seperti yang terdapat majalah, dokumen peraturan, buku, catatan harian, serta notulen rapat, dan

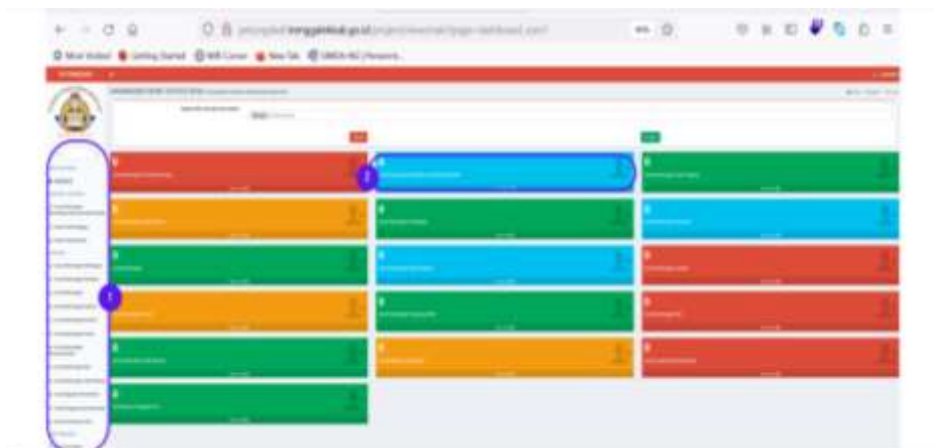
sebagainya (Rijali, 2018). Pada penelitian ini, peneliti mengamati dan mencatat informasi yang terkait dengan layanan Petung Dadi di Dinas kominfo Kabupaten Trenggalek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang berjudul Penyelenggaraan *E-Goverment Berbasis Aplikasi Pelayanan Tunggal Sepenuh Hati (Petung Dadi)* Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Peneliti menggunakan pendekatan teori teori 5 pilar model Fietkiewicz, Mainka, dan Stock (2017) sebagai alat analisis dengan indikator sebagai berikut:

Information (Informasi)

Pilar pertama adalah informasi karena, segala kegiatan pelayanan yang diperlukan dalam menerapkan sebuah prosedur kebijakan mudah diketahui pelaksana kebijakan yaitu masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu penyebaran informasi untuk memahami kebijakan pemerintah. Pada aplikasi layanan Petung Dadi memuat informasi yang mampu memaksimalkan penerapan layanan petung dadi seperti buku panduan penggunaan aplikasi, Contact Person yang bisa dihubungi ketika terjadi kendala, serta terdapat arahan disetiap menu layanan dan informasi status penyelesaian dokumen yang diajukan. Selanjutnya di dalam aplikasi Petung Dadi terdapat tampilan dashboard jenis layanan sesuai dengan akun user pemohon, selain itu terdapat halaman dashboard front office Desa. Alur pembuatan surat dalam aplikasi petung dadi sudah tersusun secara sistematis mulai dari pengajuan permohonan, selanjutnya diferivikasi oleh desa. Pada menu layanan Petung Dadi menampilkan informasi sesuai kebutuhan pengguna sebagai berikut:



Gambar 1. Dashboard Layanan Petung Dadi
Sumber : (<https://petungdadi.trenggalekkab>)

Terdapat beberapa layanan yang dapat diakses melalui Petung Dadi yaitu: Surat kematian, Surat kehilangan, Surat keterangan pindah sekolah, Surat keterangan domisili, Surat keterangan usaha, Surat registrasi pernikahan, Surat keterangan menumpang nikah, Surat keterangan wali, Surat pengantar izin keramaian, SKTM, Surat keterangan SKCK, Surat keterangan adat istiadat dan berkelakuan baik, Surat izin orang tua kerja luar negeri, Surat permohonan KIS. Berikut adalah tata cara pelayanan Petung Dadi yang melalui Front Office Desa pada di antaranya:

- a) Log in ke *aplikasi petung dadi*
- b) Lalu masuk ke alamat web petung dadi (<https://petungdadi.trenggalekkab.go.id>)

- c) Sesudah masuk ke dalam web, pilih jenis surat yang akan dibuat
- d) Selanjutnya masukkan NIK dan pilih "Cari NIK"
- e) Apabila sudah berhasil, akan muncul NIK pemohon , lalu pilihlah sesuai kebutuhan dan nomor
- f) Apabila telah berhasil, data NIK akan bisa muncul. Setelah itu, pilih "Simpan", pastikan data sesuai pada data KTP/KK pemohon
- g) Dan klik setuju dengan memilih tombol warna hijau, dan apabila ingin menghapus menggunakan tombol merah, edit dengan memilih tombol biru.
- h) Lalu tombol aksi bias langsung berganti seperti pada gambar tampilan di atas, dan pilih tombol detail untuk memantau pengawasan surat.
- i) Yang terakhir di halaman front office desa, kita sudah dapat memantau sampai mana berkas itu sudah di terima oleh yang bersangkutan.

Syarat terpenuhinya *aplikasi E-Government* harus dapat mudah di akses oleh publik serta memberikan manfaat pada pengguna. Pada penelitian ini, di temukan bahwa aplikasi petung dadi masih mengalami error dan belum tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni dalam *penggunaan IT*. Maka dapat di simpulkan pilar informasi belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan belum mencantumkan deskripsi terkait kegunaan layanan aplikasi Petung Dadi. Ditambah lagi sumber daya manusia yang belum mumpuni terkait IT serta jaringan yang tidak stabil sehingga mengganggu pengguna.

Communication (Komunikasi)

Pilar kedua adalah komunikasi dimana Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Trenggalek memanfaatkan tampilan media sosial sebagai komunikasi dua arah seperti halnya instagram dan youtube. Di dalam pilar komunikasi, Dinas Kominfo juga memanfaatkan website, email , serta nomor telepon yang di cantumkan dalam website resmi Dinas Kominfo.



Gambar 2. Website Kominfo Kabupaten Trenggalek
Sumber: (<https://www.trenggalekkab.go.id>, n.d.-a)

Di dalam komunikasi *aplikasi E-Government* seharusnya dapat menyediakan ruang di mana masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan penyedia layanan yang di lakukan melalui aplikasi. Pada aplikasi Petung Dadi belum sepenuhnya di kembangkan dalam fungsi ini karena dalam aplikasi Petung Dadi belum di kembangkan ruang untuk pengaduan masyarakat, akan tetapi pengaduan hanya menggunakan contact person

yang ada dashboard tampilan awal layanan. Dalam hal ini penerapan petung dadi belum bisa di lakukan secara maksimal. Untuk melakukan komunikasi dua arah melalui aplikasi. Sedangkan, komunikasi antar Pemerintah di lakukan secara langsung di luar layanan Petung Dadi pihak Desa maupun Kecamatan dengan Dinas Kominfo di lakukan melalui grup whatsapp yang di wadah Dinas Kominfo sebagai koordinasi untuk mempermudah komunikasi.

Transaction (Transaksi)

Pilar ketiga yaitu pilar transaksi yang menjelaskan bagaimana website dapat di pergunakan sebagai media transaksi keuangan maupun non keuangan dalam pelayanan publik. Sebagai layanan online *Petung Dadi* hanya di gunakan untuk menerbitkan dokumen saja. Petung dadi sebagai sarana untuk menginput data masyarakat yang tersedia dalam menu aplikasi petung dadi kemudian mencetak surat tersebut secara mandiri. Maka dari itu, di dalam pilar transaksi tidak terpenuhi pada layanan Petung Dadi karena layanan hanya sebatas sarana atau wadah untuk mempermudah dalam menerbitkan dokumen tanpa harus datang ke kantor.

Integration (Integrasi)

Sebelumnya aplikasi *petung dadi* terintegrasi dengan Database Dukcapil Kota Trenggalek dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional) akan tetapi saat ini layanan petung dadi hanya terintegrasi dengan BSSN saja. Pada tahun 2022 Dinas Dukcapil tidak lagi memberikan data karena koneksi di putus akibatnya perubahan kebijakan aplikasi Petung Dadi yang sebelumnya terintegrasi dengan data kependudukan menjadi terputus. Maka dari itu, aplikasi Petung Dadi terintegrasi dengan BSSN terkait mempermudah tanda tangan digital. Dapat disimpulkan dari pilar ini kurang sepenuhnya terpenuhi dikarenakan adanya perubahan kebijakan data SIAK yang terputus yang pada awalnya diisi secara otomatis beralih diisi secara manual.

Participation (Partisipasi)

Partisipasi adalah sebuah bentuk penerapan dari pemerintah yang mana partisipasi publik harus di pertimbangkan. Pemanfaatan layanan Petung Dadi masih sangat terbatas di dalam hal partisipasi publik karena belum terdapat kuisioner online fitur penilaian maupun kolom komentar serta saran dari pengguna.

KESIMPULAN

Bahwa Penyelenggaraan *E-Government Berbasis Aplikasi Pelayanan Tunggal Sepenuh Hati (Petung Dadi)* Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Menunjukkan potensi yang baik dalam hal menyederhanakan pelayanan publik. Namun, berdasarkan analisis terhadap lima pilar model *Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017)* masih belum terpenuhi secaramaksimal dan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian dari tujuan optimal dari aplikasi ini diantaranya : Dalam pilar informasi masih terdapat kekurangan dalam hal deskripsi layanan. Sementara itu masih kurangnya SDM yang mumpuni di bidang IT dan stabilitas jaringan yang mengakibatkan kurang optimalnya penyampaian informasi kepada pengguna yang menjadi penghambat kemudahan mengakses informasi terhadap layanan. Pilar Komunikasi antara pengguna dan penyedia layanan masih terbatas. Fitur pengaduan yang belum terintegrasi dengan baik dalam aplikasi menjadi kendala dalam membangun komunikasi dua arah yang efektif. Kemudian ada pilar transaksi, belum sepenuhnya terpenuhi dimana layanan petung

dadi hanya dapat menerbitkan dokumen, dan mengharuskan pemohon untuk mencetak dokumen sendiri. aplikasi Petung Dadi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk transaksi, baik keuangan maupun non-keuangan. Fungsi aplikasi ini masih sebatas sebagai sarana untuk menerbitkan dokumen secara mandiri. Pilar integrasi belum sepenuhnya terpenuhi. Integrasi dengan database kependudukan yang sempat terjalin telah terputus, sehingga efisiensi dalam pengisian data menjadi berkurang. Meskipun masih terintegrasi dengan BSSN untuk tanda tangan digital, namun belum optimal. Selain itu, didalam tingkat partisipasi publik dalam pengembangan aplikasi masih rendah. Kurangnya fitur-fitur yang memungkinkan pengguna memberikan masukan dan penilaian terhadap layanan menjadi salah satu penyebabnya. Serta masih kurangnya sosialisasi terkait aplikasi di masyarakat, kurangnya kesiapan desa dan sumber daya manusianya. Akibatnya, layanan petung dadi yang digunakan masyarakat secara online belum sepenuhnya terpenuhi. Secara keseluruhan, implementasi *aplikasi Petung Dadi* masih membutuhkan beberapa perbaikan untuk dapat mencapai tujuan *E-Government* semakin lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. (2022). *Petung Dadi, Urus Surat Pengantar Desa Cukup Lewat Aplikasi di Kabupaten Trenggalek*. Surya.Co.Id.
- Adolph, R. (2016). *Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*. 11(2), 1–23.
- Anang Sugeng Cahyono. (2021). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal PUBLICIANA*, 13(1), 83–88. <https://doi.org/10.36563/p.v13i1.207>
- Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (1986). Studi Analisis Konsep E-Government. *Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme*, 29 Suppl, 54–68.
- Cahyono, A. S., Sarahfina, M., & Destaru, B. (2024). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government*. 7(8), 3088–3094. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5994>
- Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, A. Y. K. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik*, IX(1), 254–263.
- Haryanti, N., & Indarti, L. (2022). Strategi Pembelajaran Kiai Dalam Membentuk Karakter Jujur Dan Disiplin Santri. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 121–136. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.121-136>
- Hendriyaldi, Erida, O. Y. (2022). Transformasi pelayanan publik digital di masa pandemi covid-19 untuk mewujudkan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 669–682.
- Hidayat, R., Darmini Roza, & Philips A. Kana. (2024). Implikasi Penyederhanaan Birokrasi terhadap Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 22–31. <https://doi.org/10.60034/eqdx5045>
- <https://petungdadi.trenggalekkab.go.id>. (2022). *Buku Panduan Petung Dadi*.
- <https://www.trenggalekkab.go.id>. (n.d.-a). *Pemkab Trenggalek Luncurkan Aplikasi Petung Dadi, Urus Surat Dari Desa Hingga Kecamatan Cukup Dengan Aplikasi*.
- <https://www.trenggalekkab.go.id>. (2022). *Usung Inovasi Petung Dadi, Dinas Kominfo*

Raih Juara II Dalam Gelaran TIF 2021.

- Lestari, Fitriana, & Lusiana. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek Melalui Aplikasi Siminaksopal dan Program Jempol Keren*. 1–18.
- Muhdiyati, I., & Utami, I. I. S. (2020). Jurnal perseda. *Jurnal Persada*, III(3), 176–181.
- Renaldi, & Oktariyanda. (2018). *Strategi Peningkatan Pelayanan Administrasi*. 499–514.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali. *Al Hadharah*, 17(33), 81–95.
- Setiajit, S. B., Permana, I., Ikhsan, M., Pratama, R. A., Studi, P., Pemeliharaan, T., & Pembangunan, U. T. (2023). *Penerapan Sistem Administrasi Online Pada Masyarakat Pelayanan Publik Sangat Ditingkatkan Dalam Segi Kemudahan Dan Kecepatan Untuk Kebutuhan Masyarakat . Pemanfaatan teknologi dalam mengakses kebutuhan administrasi sering digunakan dalam dalam hal pengaju*. 4(November), 142–147.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).